

INTISARI

EKSPOSUR DATA PUTUSAN PERCERAIAN SEBAGAI IMPLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI DALAM REFORMASI SISTEM PERADILAN PERDATA DI ERA HUKUM DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 574/Pdt.G/2024/PA.JS)

Vanesa Setianda¹ dan Tata Wijayanta²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan putusan perdata yang wajib dianonimisasi dan pengaturan dari pengelolaan data pribadi pada studi putusan perdata, serta dampak perlindungan eksposur informasi putusan perceraian nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JS terhadap hak pribadi individu dan reputasi yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara narasumber dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu merujuk/mengumpulkan bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi pustaka/dokumentasi yaitu studi mempelajari, menelusuri, memeriksa dan mengkaji data sekunder dari instansi pemerintahan dan data yang dipublikasikan seperti buku, laporan, hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan pengadilan, dan semua peraturan terkait UU PDP. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah hakim PA Jakarta Selatan dan Hakim Agung MA RI. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa publikasi putusan perdata tanpa anonimisasi pada perkara yang disidangkan secara tertutup dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu terkait, seperti trauma, rasa malu sosial, penyebaran data pribadi, dan pelanggaran privasi, meskipun tidak merugikan kepentingan umum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau laporan ke pengadilan.

Kesimpulan penelitian ini adalah kelalaian dalam proses anonimisasi putusan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi termasuk reputasi dan kesehatan mental para pihak, sehingga pengelolaan putusan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan PDP. Dampak publikasi tanpa anonimisasi adalah menimbulkan kerugian seperti merusak reputasi dan menimbulkan trauma bagi korban. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah penguatan mekanisme anonimisasi putusan, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan ketat, serta edukasi hukum menjadi kunci penting dalam menjamin PDP dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Digital, Reformasi Peradilan Perdata, Keterbukaan Informasi Publik, dan Putusan Perceraian.

¹ Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (email: vanesa.setianda@mail.ugm.ac.id)

² Guru Besar Hukum Acara Perdata Kekhususan Acara Kepailitan Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (email: wijayanta@mail.ugm.ac.id)

ABSTRACT

DIVORCE DECISION DATA EXPOSURE AS AN IMPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE REFORM OF THE CIVIL JUSTICE SYSTEM IN THE ERA OF DIGITAL LAW (STUDYING JUDGMENT NUMBER 574/Pdt.G/2024/PA.JS) **Vanessa Setianda³ and Tata Wijayanta⁴**

This research intends to find out and analyze the management of civil decisions that must be anonymized and the regulation of personal data management in the study of civil decisions, as well as the impact of protecting the exposure of information on divorce decisions number 574/Pdt.G/2024/PA.JS regarding the individual's personal rights and reputation. This research is a normative legal research supported by interviews with informants using library research and data seconds sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of collecting research data was carried out using the documentation method, namely referring/collecting documented materials, while the data collection tool used was literature/documentation study, namely the study of studying, tracing, examining and reviewing secondary data from government agencies and published data such as books, reports, research results, seminar papers, expert writings, court decisions, and all regulations related to the PDP Law. The interviewees in this research were the South Jakarta PA judge and the Supreme Court Justice of the Republic of Indonesia. Data analysis was conducted qualitatively.

Research result and the discussion shows that the publication of civil decisions Without anonymity in cases tried behind closed doors, it can cause material and immaterial harm to the individuals involved, such as trauma, social embarrassment, the disclosure of personal data, and violations of privacy, even if it does not harm the public interest. Aggrieved parties can file an objection or report to the court.

Conclusion This research is Negligence in the anonymization process for decisions has the potential to violate the parties' privacy rights, including their reputations and mental health. Therefore, decision management must prioritize the principles of prudence and PDP. The impact of publication without anonymization is detrimental, such as damaging reputations and traumatizing victims. The suggestion based on the results of this research is Strengthening the decision anonymization mechanism, increasing human resource capacity, strict supervision, and legal education are important keys to ensuring PDP and increasing public trust in judicial institutions.

Keywords: Personal Data Protection, Digital Law, Judicial Reform Civil Law, Public Information Disclosure, and Divorce Decisions.

³ Undergraduate Student of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (email: vanessa.setianda@mail.ugm.ac.id)

⁴ Professor of Civil Procedure Law, Specialization in Bankruptcy Procedures, Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (email: wijayanta@mail.ugm.ac.id)